

# **ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) TIONG BUU KECAMATAN LONG APARI**

**Silvia Elistina Anying**

**eJournal Pemerintahan Integratif  
Volume 12, Nomor 4, 2026**



## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (Bpk) Tiong  
Buu Kecamatan Long Apari

Pengarang : Silvia Elistina Anying

NIM : 2202026127

Program : S1 Pemerintahan Integratif

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Pemerintahan Integratif Fisip Unmul.

Samarinda, 6 Juli 2026

Pembimbing ,

  
**M. Aviy Adhitya Putra Pratama..M.I.P.**  
**NIP: 199706122024061001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 PIN**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

|                        |                                         |                                    |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nama Terbitan</b> : | <b>eJournal Pemerintahan Integratif</b> | <b>Bagian Perspustakaan S1 PIN</b> |
| <b>Volume</b> :        |                                         |                                    |
| <b>Nomor</b> :         |                                         |                                    |
| <b>Tahun</b> :         |                                         |                                    |
| <b>Halaman</b> :       |                                         | <b>Aulia Rahmah,S.IP</b>           |



## **ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) TIONG BUU KECAMATAN LONG APARI**

**Silvia Elistina Anying<sup>1</sup>, M Aviv Adhitya Putra Pratama<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tiong Buu dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga perwakilan masyarakat kampung di Kecamatan Long Apari. BPK memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya dalam fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui gambaran nyata atas kejadian yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi tentang adanya kinerja badan permusyawaratan kampung (bpk) tiong buu kecamatan long apari dan juga melalui pengamatan yang dituliskan peneliti dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tiong Buu secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dalam fungsi penyaluran aspirasi dan kerja sama dengan pemerintah kampung..*

**Kata Kunci :** *menganalisis kinerja badan permusyawaratan kampung, legislasi, pengawasan*

### **Pendahuluan**

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan desa atau kampung di Indonesia. Secara umum, BPK berfungsi sebagai lembaga legislatif tingkat kampung yang menjalankan fungsi kontrol, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat terhadap pemerintah kampung Menurut Renhard G. Kolomsusu (2024). Dalam kerangka otonomi daerah, keberadaan BPK dimaksudkan agar pembangunan di tingkat kampung tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui wakil-wakilnya Sandi Sandi & Andi Safriani (2021).

Fenomena yang terjadi di banyak kampung, termasuk di Tiong Buu Kecamatan Long Apari, menunjukkan bahwa masyarakat semakin menaruh harapan besar pada BPK sebagai pengawas agar penyelenggaraan pemerintahan kampung lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kebutuhan warga. Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia secara normatif berlandaskan pada

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: silviaelistina@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan desa.

Landasan hukum Undang-Undang Desa kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang memberikan penjabaran teknis atas pelaksanaan kewenangan desa. Peraturan - peraturan tersebut mengatur secara rinci mekanisme perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengawasan, serta hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa lainnya. Kehadiran regulasi pelaksana ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum dapat diimplementasikan secara operasional dalam praktik pemerintahan desa sehari-hari. Salah satu regulasi pelaksana yang sangat penting adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tiong buu***

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan kampung (yang juga diadopsi dalam peraturan daerah mengenai kampung), BPK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung tiong bu, u kecamatan long apari kabupaten mahakam ulu bersama kepala kampung. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kampung. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung tiong buu. Menyampaikan informasi tentang program dan kebijakan kampung kepada warga.

#### ***Metode Analisis Kinerja BPK Tiong Buu***

Analisis kinerja BPK Kampung Tiong Buu dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mencakup indikator-indikator berikut:

- Partisipasi : Tingkat kehadiran dalam rapat dan kegiatan masyarakat  
Transparansi dan
- Akuntabilitas : Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kegiatan.
- Efektivitas : Hasil dari program kerja BPK tiong buu dan pengaruhnya terhadap kebijakan kampung.
- Responsivitas : Kemampuan merespons aspirasi dan keluhan warga.
- Koordinasi : Hubungan kerja dengan pemerintah kampung lembagamemerlukan

#### ***Temuan Awal Mengenai Kinerja BPK Tiong Buu***

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat, aparat kampung, dan anggota BPK Tiong buu, ada beberapa gambaran sebagai berikut:

**Partisipasi:** Sebagian besar anggota BPK tiong buu aktif menghadiri rapat rutin. Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih rendah karena keterbatasan informasi dan akses. Sebagian besar anggota BPK Tiong Buu aktif menghadiri rapat

rutin, sehingga koordinasi dan komunikasi internal dapat berjalan dengan baik. Kehadiran yang konsisten menunjukkan adanya rasa tanggung jawab serta keterikatan anggota terhadap kegiatan organisasi.

Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi mengenai jadwal dan agenda musyawarah, keterbatasan akses menuju lokasi kegiatan, serta minimnya sosialisasi yang membuat masyarakat belum merasa terlibat secara penuh.

**Transparansi:** Transparansi dalam penyampaian laporan kegiatan dan penggunaan dana di BPK Tiong Buu masih terbatas, sehingga informasi yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga belum tersampaikan dengan baik. Mekanisme pelaporan yang belum terbuka sepenuhnya membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui perkembangan kegiatan maupun pengelolaan dana kampung.

Beberapa warga bahkan menyampaikan bahwa mereka belum pernah menerima salinan hasil musyawarah kampung. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala dalam distribusi informasi dan kurangnya sistem dokumentasi yang merata, sehingga masyarakat belum dapat berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan kampung secara optimal.

**Efektivitas:** Beberapa program yang diusulkan oleh BPK Tiong Buu sebenarnya telah masuk dan diakomodasi dalam APB Kampung, sehingga menunjukkan bahwa usulan mereka mendapat perhatian dan dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Proses perencanaan juga berjalan cukup baik karena program-program tersebut telah melalui tahap pembahasan dan disetujui dalam musyawarah kampung. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal. Banyak program yang akhirnya tertunda atau tidak berjalan sesuai rencana karena keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung. Kondisi ini membuat realisasi kegiatan menjadi lambat dan manfaat yang diharapkan masyarakat tidak dapat segera dirasakan, sehingga efektivitas peran BPK dalam mendorong pembangunan kampung perlu terus ditingkatkan.

**Responsivitas:** BPK Tiong Buu dinilai cukup responsif dalam menangani isu-isu sosial yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan pendidikan. Ketika muncul permasalahan atau usulan dari warga terkait dua bidang tersebut, BPK biasanya segera memberikan tanggapan dan berusaha mendorong penyelesaiannya melalui musyawarah atau koordinasi dengan pihak terkait.

Namun, responsivitas tersebut belum terlihat dalam isu lingkungan. BPK dianggap kurang aktif dalam menanggapi permasalahan seperti kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, atau pelestarian alam di sekitar kampung. Minimnya perhatian terhadap isu lingkungan menunjukkan bahwa aspek ini masih perlu ditingkatkan, baik dari segi prioritas maupun upaya nyata dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

**Koordinasi:** Hubungan antara BPK Tiong Buu dan pemerintah kampung pada dasarnya terjalin dengan cukup harmonis. Kedua pihak dapat bekerja sama dalam berbagai kegiatan serta berupaya saling mendukung demi kelancaran pembangunan

kampung. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa komunikasi antar lembaga berjalan baik dan tidak menimbulkan konflik yang signifikan. Namun, dalam praktik penyusunan program kerja tahunan, masih ditemukan tumpang tindih peran antara BPK dan pemerintah kampung.

### ***Faktor Pendukung***

Dukungan tokoh adat dan masyarakat, komitmen anggota BPK Tiong Buu dalam menjalankan tugas, serta adanya pelatihan dan pembinaan dalam pemerintah daerah merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan fungsi BPK Tiong Buu. Dukungan tokoh adat dan masyarakat tercermin dari adanya kepercayaan, partisipasi dalam musyawarah adat, serta penerimaan terhadap keputusan lembaga, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan efektivitas kinerja BPK Tiong Buu. Komitmen anggota ditunjukkan melalui rasa tanggung jawab, loyalitas, dan konsistensi dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan nilai-nilai adat dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan anggota, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan berkelanjutan. Sinergi antara dukungan sosial, komitmen internal, dan pembinaan kelembagaan tersebut menjadi landasan penting bagi optimalisasi kinerja BPK Tiong Buu.

### ***Faktor Penghambat***

Rendahnya tingkat pendidikan sebagian anggota BPK Tiong Buu menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, karena berdampak pada keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, prosedur administrasi, serta mekanisme pengawasan. Selain itu, minimnya anggaran operasional BPK juga menghambat pelaksanaan kegiatan seperti rapat, koordinasi, dan pengawasan lapangan, sehingga kinerja lembaga tidak dapat berjalan secara optimal.

Faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya akses komunikasi antarwilayah kampung yang menyebabkan kurang lancarnya koordinasi dan pertukaran informasi antaranggota BPK Tiong Buu, terutama yang berada di wilayah geografis yang berjauhan. Kondisi tersebut secara keseluruhan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BPK Tiong Buu.

### ***Metode Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis cermati, seharusnya jelas bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, khususnya studi kasus sebagai fokus utama dan teknik untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang dikaitkan dengan beberapa orang atau kelompok orang, masalah sosial atau kemanusiaan.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang tujuan utamanya adalah mengembangkan penjelasan yang tidak memihak tentang keadaan tertentu. Tugas penting termasuk dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti mengembangkan pertanyaan dan prosedur, mendapatkan data tertentu dari partisipan, menyimpulkan tema umum dari topik tertentu, dan menilai signifikansi data. Struktur atau kerangka laporan akhir penelitian dapat diadaptasi. Partisipan



dalam jenis penelitian ini diharuskan mengadopsi gaya perspektif penelitian induktif, berkonsentrasi pada makna individu dalam melakukan penelitian ini yang menjadi sumberdata/key informant maupun informant yang akan di mintai informasinya berkenaan dengan fokus penelitian yaitu Kepala BPK, Kepala Kampung, dan Masyarakat Kampung.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan** ***Kecamatan Long Apari***

Kecamatan Long Apari terdiri atas beberapa kampung yang tersebar dan berjauhan, sehingga membutuhkan waktu dan sarana transportasi khusus untuk menjangkau setiap wilayah. Sungai masih menjadi sarana utama mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Keterbatasan infrastruktur jalan darat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kampung Tiong Buu merupakan salah satu kampung administratif di Kecamatan Long Apari yang memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan tingkat aksesibilitas yang terbatas. Sarana transportasi menuju kampung ini sebagian besar masih mengandalkan jalur sungai menggunakan perahu atau ketinting, sementara akses darat belum sepenuhnya memadai dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam serta cuaca. Kondisi tersebut menjadikan Kampung Tiong Buu memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Dari segi sosial dan pemerintahan, masyarakat Kampung Tiong Buu didominasi oleh masyarakat adat Dayak yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam struktur pemerintahan kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memiliki peran penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi menampung aspirasi, melakukan pengawasan, serta bermusyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Oleh karena itu, Kampung Tiong Buu dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis kinerja BPK dalam menjalankan fungsi dan perannya di tingkat kampung.

Dari sisi kehidupan masyarakat, Kecamatan Long Apari dihuni oleh masyarakat lokal yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat. Nilai kebersamaan, gotong royong, serta musyawarah masih menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di tingkat kampung. Kondisi sosial tersebut berpengaruh terhadap pola kerja pemerintahan kampung dan lembaga-lembaga kampung, termasuk peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam menyalurkan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian mengenai keterlibatan pemangku kepentingan, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan stakeholder engagement oleh BPK Kampung Tiong Buu telah menunjukkan adanya mekanisme partisipatif, namun efektivitasnya masih belum optimal. Secara normatif, BPK telah menjalankan fungsi utamanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai mitra pemerintah kampung, penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawas jalannya

pemerintahan kampung. Keterlibatan dalam musyawarah kampung dan pembahasan peraturan kampung menunjukkan bahwa secara struktural BPK telah memiliki ruang partisipasi yang jelas dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang terjadi masih bersifat administratif, belum sepenuhnya partisipasi yang deliberatif dan aktif. Selain itu, dalam fungsi pengawasan, kendala geografis, keterbatasan waktu, dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama. Kondisi wilayah Long Apari yang relatif jauh dan akses yang terbatas turut mempengaruhi intensitas pengawasan dan komunikasi.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan BPK tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi wilayah dan kapasitas kelembagaan. Dalam aspek penyerapan aspirasi, terdapat indikasi bahwa mekanisme penyampaian aspirasi belum berjalan secara sistematis dan terstruktur. Jika aspirasi hanya disampaikan melalui forum musyawarah atau komunikasi langsung tanpa adanya sistem pencatatan dan tindak lanjut yang jelas, maka potensi terjadinya aspirasi yang tidak tersampaikan atau tidak ditindaklanjuti menjadi lebih besar.

### ***Pencapaian Fungsi Utama BPK***

Langkah selanjutnya adalah melakukan keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu dengan membangun komunikasi dan interaksi secara aktif antara BPK Kampung Tiong Buu dan pihak-pihak yang terkait. Pemangku kepentingan tersebut meliputi pemerintah kampung (kepala kampung dan perangkat kampung), pemerintah kecamatan Long Apari, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kampung Tiong Buu.

Proses keterlibatan ini dilakukan melalui musyawarah kampung, pertemuan resmi, dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, BPK menyampaikan informasi terkait rencana dan kebijakan kampung, sekaligus menampung aspirasi, masukan, serta harapan masyarakat. Selain itu, BPK juga berperan membangun kesepahaman dan dukungan antara masyarakat dan pemerintah kampung agar setiap program dan kegiatan kampung dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan warga.

Kepala BPK menilai bahwa pelaksanaan tugas BPK sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan serta penggunaan anggaran kampung, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti jarak wilayah dan keterbatasan sumber daya.

Sementara itu, Kepala Kampung menilai bahwa peran BPK sudah berjalan namun belum maksimal. Keterlibatan BPK dalam musyawarah kampung sudah ada, tetapi keaktifan anggota dalam menyampaikan pendapat masih perlu ditingkatkan. Selain itu, fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dinilai belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan BPK dalam stakeholder engagement di Kampung Tiong Buu sudah berlangsung, namun masih

memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal keaktifan anggota, intensitas komunikasi dengan masyarakat, serta penguatan koordinasi antara BPK dan pemerintah kampung agar pelaksanaan program dan pembangunan kampung dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang terjadi masih bersifat administratif, belum sepenuhnya partisipasi yang deliberatif dan aktif. Selain itu, dalam fungsi pengawasan, kendala geografis, keterbatasan waktu, dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama. Kondisi wilayah Long Apari yang relatif jauh dan akses yang terbatas turut mempengaruhi intensitas pengawasan dan komunikasi.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan BPK tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi wilayah dan kapasitas kelembagaan. Dalam aspek penyerapan aspirasi, terdapat indikasi bahwa mekanisme penyampaian aspirasi belum berjalan secara sistematis dan terstruktur. Jika aspirasi hanya disampaikan melalui forum musyawarah atau komunikasi langsung tanpa adanya sistem pencatatan dan tindak lanjut yang jelas, maka potensi terjadinya aspirasi yang tidak tersampaikan atau tidak ditindaklanjuti menjadi lebih besar.

### ***Efektivitas & Efisiensi Kerja BPK***

Efektivitas dan efisiensi kerja Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan aspek penting dalam menilai sejauh mana BPK mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran dan kewenangan yang dimiliki. Efektivitas kerja BPK dapat dilihat dari tingkat keterlibatan BPK dalam proses pengambilan keputusan kampung, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sementara itu, efisiensi kerja BPK berkaitan dengan kemampuan BPK dalam menjalankan tugas tersebut dengan memanfaatkan waktu, sumber daya, dan koordinasi yang ada secara optimal. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kerja BPK Kampung Tiong Buu, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu Kepala BPK dan Kepala Kampung. Berdasarkan kerangka teori efektivitas, suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks BPK Kampung Tiong Buu, efektivitas kerja dapat dilihat dari keterlibatan BPK dalam pembahasan peraturan kampung, keikutsertaan dalam musyawarah kampung, serta pelaksanaan fungsi pengawasan.

Hal ini mengindikasikan bahwa secara struktural dan normatif, BPK telah menjalankan perannya sesuai dengan tujuan kelembagaan yang diharapkan. Namun, jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan indikator efektivitas, khususnya pada aspek kualitas partisipasi dan capaian hasil, efektivitas kerja BPK masih belum optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Kampung yang menyatakan bahwa meskipun BPK hadir dalam musyawarah kampung, keaktifan anggota dalam menyampaika pendapat dan masukan masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan BPK masih bersifat formal, sehingga tujuan penyaluran aspirasi masyarakat belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

Dari sisi efisiensi, teori menyebutkan bahwa efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara input dan output, terutama dalam penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara, BPK Kampung Tiong Buu masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, jarak wilayah yang cukup jauh, serta kemampuan sumber daya anggota. Meskipun demikian, Kepala BPK menyampaikan bahwa BPK berupaya memanfaatkan setiap pertemuan yang ada secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya upaya efisiensi, meskipun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan internal dan eksternal.

### ***Dampak nyata pada program prioritas kampung***

Program prioritas kampung merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang telah disepakati bersama melalui Musyawarah Kampung. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab permasalahan yang muncul di tingkat kampung, baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya program prioritas, diharapkan pembangunan kampung dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.

Program prioritas kampung di Kampung Tiong Buu telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program-program yang dilaksanakan, khususnya di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum, dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap pasar, sekolah, serta layanan kesehatan, yang pada akhirnya mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.

Selain program infrastruktur, program prioritas di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kegiatan seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, dan pelatihan keterampilan dinilai mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga serta mengembangkan keterampilan yang dapat menunjang perekonomian rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa program prioritas kampung tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari sisi proses perencanaan dan pelaksanaan program, hasil wawancara menunjukkan bahwa program prioritas kampung merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Kampung. BPK berperan sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan pemerintah kampung berperan dalam merumuskan dan melaksanakan program. Keterlibatan BPK dan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

apabila ditinjau dari aspek pemerataan (equity), manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh warga. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum terlibat atau belum merasakan dampak program menunjukkan bahwa distribusi manfaat perlu dievaluasi.

Dalam konteks pembangunan inklusif, keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian fisik atau jumlah kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh manfaat yang proporsional.

Selain itu, kendala keterbatasan anggaran dan kondisi geografis yang sulit dijangkau menunjukkan adanya faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Kondisi wilayah Long Apari yang relatif terpencil berdampak pada tingginya biaya pelaksanaan dan distribusi sumber daya. Oleh karena itu, perencanaan program perlu mempertimbangkan skala prioritas yang realistis serta strategi pelaksanaan yang adaptif terhadap kondisi geografis setempat.

Dari sisi tata kelola, peran BPK dalam melakukan pengawasan dan mendorong transparansi merupakan faktor penting dalam menjaga akuntabilitas program. Namun, pengawasan yang belum sepenuhnya optimal dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Apabila mekanisme monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara sistematis dan berkala, potensi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran dapat terjadi. Lebih lanjut, keberlanjutan (sustainability) program juga menjadi aspek penting dalam analisis dampak. Program infrastruktur memerlukan pemeliharaan jangka panjang, sedangkan program sosial dan pelatihan membutuhkan tindak lanjut agar manfaatnya tidak bersifat sementara.

Oleh karena itu, pemerintah kampung bersama BPK perlu menyusun mekanisme evaluasi berkala serta strategi keberlanjutan agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program prioritas kampung di Kampung Tiong Buu telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap masyarakat, terutama dalam peningkatan akses dan kualitas hidup. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depan, diperlukan penguatan pada aspek pemerataan manfaat, peningkatan partisipasi masyarakat, pengawasan yang lebih terstruktur, serta perencanaan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan keterbatasan anggaran.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Tiong Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Kinerja BPK dalam menjalankan fungsi utama**

BPK Kampung Tiong Buu telah menjalankan fungsi utamanya secara normatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai mitra pemerintah kampung dalam pembahasan peraturan kampung, penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawas jalannya pemerintahan kampung. Keterlibatan BPK dalam Musyawarah Kampung menunjukkan adanya mekanisme partisipatif. Namun demikian, partisipasi anggota BPK masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya aktif serta deliberatif. Fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi juga belum dilakukan secara rutin dan sistematis.

2. **Efektivitas dan efisiensi kerja BPK**

Dari sisi efektivitas, BPK telah berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, tetapi hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal karena kualitas partisipasi dan intensitas pengawasan masih terbatas. Dari sisi efisiensi, BPK telah berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, meskipun terkendala oleh faktor geografis, keterbatasan waktu, serta kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kinerja BPK dapat dikatakan berjalan secara administratif, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal secara substantif.

3. Dampak program prioritas kampung

Program prioritas kampung telah memberikan dampak nyata, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses layanan dasar. Program sosial seperti posyandu dan pelatihan keterampilan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, manfaat program belum sepenuhnya merata, dan masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta belum optimalnya pengawasan dan partisipasi masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM BPK

Diperlukan pelatihan dan pembinaan secara berkala bagi anggota BPK, khususnya terkait regulasi pemerintahan kampung, pengelolaan anggaran, teknik pengawasan, serta manajemen aspirasi masyarakat. Pemerintah kecamatan maupun kabupaten dapat berperan dalam memfasilitasi kegiatan tersebut.

2. Penguatan sistem kerja dan kelembagaan

BPK perlu menyusun rencana kerja tahunan, jadwal pengawasan berkala, serta pembagian tugas yang lebih jelas antaranggota. Selain itu, diperlukan sistem dokumentasi aspirasi masyarakat yang lebih terstruktur, mulai dari pencatatan, pengelompokan isu, hingga tindak lanjut.

3. Perencanaan program yang adaptif dan inklusif

Dalam menyusun program prioritas, pemerintah kampung dan BPK perlu mempertimbangkan kondisi geografis, keterbatasan anggaran, serta kebutuhan kelompok rentan agar pembangunan kampung berjalan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Azelli, G., dkk. (2019). Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Kutai Barat: Universitas Mulawarman.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). Introduction to qualitative research methods: Phenomenological approach to the social sciences. New York: John Wiley & Sons.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of qualitative research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kolomsusu, R. G. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam meningkatkan fasilitas pembangunan Kampung Yenbeser Distrik Saunek Kabupaten Raja Ampat (Skripsi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong). <https://eprints.unidasorong.ac.id/id/eprint/343/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naftali, R. (2015). *Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat*. Kutai Barat: Universitas Mulawarman.